

**ANALISIS PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN
DALAM UJI LAYAK JALAN ANGKUTAN UMUM
KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Syamsul Ma'arif
171010027**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**ANALISIS PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN
DALAM UJI LAYAK JALAN ANGKUTAN UMUM
KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana**



**Oleh:
Syamsul Ma'arif
171010027**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsul Ma'arif
NPM : 171010027
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul :

ANALISIS PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM UJI LAYAK JALAN ANGKUTAN UMUM KOTA BATAM

Merupakan hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan panulis, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, penulis bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan Skripsi yang penulis peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Juli 2021


Syamsul Ma'arif
171010027

**ANALISIS PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN
DALAM UJI LAYAK JALAN ANGKUTAN UMUM
KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana**

**Oleh:
Syamsul Ma'arif
171010027**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 25 Agustus 2021



**Timbul Dompok S.E., M.Si
Pembimbing**



ABSTRAK

Pelaksanaan pengujian angkutan umum merupakan suatu yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah agar angkutan tersebut dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan tertib dalam berkendara. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam melakukan uji layak jalan angkutan umum. Dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, sesuai dengan hasil yang didapat di lapangan data dalam bentuk gambar, dokumen, catatan, dan wawancara. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan 4 indikator manajemen pelayanan publik yang di kemukakan oleh Robert dan Gilbert Jr yaitu Standar, pengukuran, membandingkan, tindakan. Indikator ini digunakan untuk melakukan penilaian kepada dinas perhubungan serta masyarakat yang terlibat dalam proses pelaksanaan pengujian angkutan umum. Masalah yang dihadapi terkait dengan pengujian layak jalan angkutan umum, Standar Operasional Prosedur yang tidak disosialisasikan, alat pengujian yang mati tetapi belum diperbaiki, serta sumber daya manusia yang sepenuhnya belum memahami terkait pengujian transportasi. Dalam hal ini faktor penghambat dari masalah yang terjadi yaitu proses sosialisasi dan anggaran, terkait pengujian layak jalan yang baik melalui uji berkala di Kantor Dinas Perhubungan yang kurang sehingga kesadaran masyarakat untuk melakukan uji berkala sangat rendah. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan pelaksanaan uji layak jalan angkutan umum sudah berjalan baik tapi masih belum sepenuhnya maksimal sehingga perlu di lakukan pengawasan secara rutin.

Kata Kunci: Pengawasan, Uji Layak, Angkutan Umum

ABSTRACT

The implementation of public transportation testing is something that must be done as a responsibility given by the government so that the transportation can run safely, comfortably, and in an orderly manner in driving. The purpose of this research is to understand how the activities carried out by the Department of Transportation in conducting roadworthiness tests for public transport. By using qualitative descriptive data analysis techniques, in accordance with the results obtained in the field data in the form of pictures, documents, notes, and interviews. In conducting this research, the writer uses 4 indicators of public service management proposed by Robert and Gilbert Jr. They are standard, measurement, comparison, action. This indicator is used to provide services to the transportation department and the community involved in the process of implementing public transport testing. Problems encountered were related to roadworthy testing of public transport, Standard Operating Procedures that were not socialized, testing equipment that was dead but not repaired, and human resources who did not fully understand transportation testing. In this case, the inhibiting factors of the problems that occur are the socialization process and budget, related to good roadworthiness testing through periodic tests at the Transportation Service Office which is lacking so that public awareness to conduct periodic tests is very low. From the results of the study, it can be concluded that the implementation of the roadworthiness test for public transportation has been going well but is still not fully maximized so it needs to be monitored regularly.

Keywords: *Supervision, Eligibility Test, Public Transportatin*

KATA PENGANTAR

Sujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Putera Batam. Penulis menyadari bahwa skripsi yang di buat dan di susun ini masi jauh dari kata sempurna, karena itu kritik dan saran akan selalu penulis terima dengan lapang dada. Dengan berbagai keterbatasan penulis menyadari bahwa skripsi ini tidakakan terlaksana tanpa bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu dengan hati yang terdalam, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda.S.Kom.,M.Si selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H.,selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam;
4. Bapak Timbul Dompok S.E.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing Skripsipada Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam;
5. Bapak Dedi Epriadi S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing akademik;
6. Bapak dan Ibu Dosen Administrasi Negara Universitas Putera Batam;
7. Narasumber penuls dalam melakukan penelitian ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
8. Kepada orang tua penulis banggakan Bapak H.Tukimun dan Ibu Hj.Susiati, atas doa yang diberikan dan menjadi penyemangat selama menyelesaikan studi;
9. Segenap Kaka dan abang kandung jefri, Guswira, Mustofa, Nazarofa, Fatimatuzahro, yang penulis banggakan;

10. Staf Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam Kepulauan Riau yang memperbolehkan untuk melakukan penelitian;
11. Teman-teman sekolah Redo, Bima, Hafis, Deni, sebagai teman bercanda setiap hari;
12. Teman-teman kampus Azlan, Junita, Pranoto, Widiya, Kristina, Namiro, sonti, yang memberikan, keceriaan dimasa perkuliahan;
13. Abang senior Khoirul Umam, Tan Kelvin, Nofriyandi, yang memberikan masukan dan pengalamanya dalam membuat skripsi;
14. Patner saya Leni Juniaty yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
15. Serta berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan namanya dalam menyelesaikan skripsi ini;

Demikian ucapan terima kasih untuk semua yang telah memberikan do'a dukungan, dan harapan, semoga Allah SWT, memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Amin

Batam, 25 Agustus 2021

Syamsul Ma'arif
171010027



Universitas Putera Batam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	II
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Batasan Masalah	8
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian.....	9
1.6. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Manajemen Pelayanan Publik	11
2.1.1. Konsep Manajemen Pelayanan	11
2.1.2. Analisis kebijakan Manajmen Pelayanan.....	12
2.1.3. Kebijakan Manajemen Pelayanan Publik	13
2.1.4. Proses Tahapan Manajemen.....	13
2.2. Pengawasan	14
2.2.1. Indikator Pengawasan	15
2.2.2. Maksud Dan Tujuan Pengawasan	16
2.2.3. Bentuk Pelaksanaan Pengawasan.....	17
2.2.4. Proses Tahapan Pengawasan.....	18
2.2.5. Pelayanan Publik.....	19
2.2.6. Pengawasan Pelayanan Publik	19
2.3. Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan	21

2.4.	Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan.....	23
2.4.1.	Uji Kelayakan Kendaraan Umum	24
2.4.2.	Angkutan Umum.....	24
2.5.	Penelitian Terdahulu.....	26
2.6.	Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODE PENELITIAN		31
3.1.	Jenis Penelitian	31
3.2.	Fokus Penelitian	31
3.3.	Sumber Data	31
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	32
3.5.	Metode Analisis Data	33
3.6.	Keabsahan Data	34
3.7.	Lokasi Dan Jadwal Penelitian	35
3.7.1.	Lokasi Penelitian.....	35
3.7.2.	Jadwal Penelitian.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		37
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.1.1.	Tugas Pokok.....	37
4.1.2.	Fungsi.....	38
4.1.3.	Sejarah Terbentuknya Dinas Perhubungan Kota Batam.....	38
4.2.	Visi dan Misi	39
4.2.1.	Visi	39
4.2.2.	Misi	39
4.3.	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Batam	40
4.4.	Pengawasan Uji Layak Jalan Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Batam.....	41
4.5.	Faktor Penghambat Pengawasan Uji Layak Jalan Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Batam	48
4.6.	Pengujian Angkutan Umum Kota Batam	50
4.7.	Pembahasan	51
4.7.1.	Analisis Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Uji Layak Jalan Angkutan Umum Kota Batam.....	51
4.7.2.	Faktor Penghambat Dalam Pengujian Angkutan Umum.....	55
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		58

5.1. Simpulan.....	58
5.2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	63
Lampiran I. Pedoman Wawancara.....	63
Lampiran II. Daftar Riwayat Hidup	72
Lampiran III. Surat Keterangan Penelitian.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Angkutan Umum Dalam Trayek di Kota Batam Tahun 2018-2020.....	5
Tabel 3. 1 Data Informan.....	32
Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian.....	36
Tabel 4. 1 Proses Pemeriksaan Teknis	44
Tabel 4. 2 Rekapitulasi Kendaraan Bermotor Yang Diuji Berkala di PKB Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2020	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Barfikir	30
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Batam	40
Gambar 4. 2 Bagan Alur Pengujian Kendaraan Bermotor	42
Gambar 4. 3 Peta Trayek Utama Angkutan Umum Kota Batam	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia yaitu mencapai urutan ke-6 dunia setelah Amerika Serikat yaitu 17,503 pulau terhitung pada tahun 2020 hal ini bisa berubah seiring berjalannya waktu disebabkan karena hilangnya pulau-pulau kecil yang disebabkan oleh pengikisan tanah oleh air laut yang bersifat menghabisi tanah di pesisir pantai (Liputan6.com 2020). Indonesia terletak di asia tenggara didukung dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, sehingga dapat mempengaruhi lajunya pertumbuhan ekonomi dilingkungan masyarakat. Besarnya pusat perekonomian suatu wilayah dapat menimbulkan urbanisasi yang mengakibatkan berbagai masalah, karena tidak ada pengendalian dan pengawasan di dalamnya. Hal seperti ini yang sering terjadi dikebanyakan kota, seperti di Kota Batam saat ini. Terlalu banyaknya jumlah penduduk mengakibatkan penumpukan sarana transportasi sehingga dapat mengakibatkan kemacetan dalam lalulintas.

Transportasi merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memindahkan manusia, hewan, maupun barang dari tempat awal menuju ke tempat lainnya biasanya menggunakan bantuan hewan maupun mesin yang diatur oleh manusia. Pada hakikatnya transportasi digunakan oleh manusia untuk memperlancar dan mempercepat kegiatan yang dijalankan dalam setiap harinya. Bentuk dari terdapat tiga jenis transportasi yaitu transportasi darat, udara, dan laut.

Pada suatu wilayah kelancaran lalulintas tidak terlepas dari pemerintah yang cepat dan tepat dalam mengambil tindakan, serta masyarakat yang mematuhi undang-undang dan peraturan daerah. Dalam mewujudkan kualitas angkutan umum yang baik sudah seharusnya jenis angkutan umum seperti Metro Trans, Bus Kota Dan Bus Trans sudah seharusnya diawasi oleh pemerintah, pengawasan tersebut berupa uji layak jalan.

Uji layak jalan atau uji berkala ini sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan. Selain itu ada juga peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 133 Tahun 2015 yang isinya tentang pengujian berkala kendaraan bermotor, serta Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Lalulintas Angkutan Jalan serta jaringan transportasi jalan dan peremajaan, penambahan dan penghapusan kendaraan bermotor melalui Dinas Perhubungan Kota Batam. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka jumlah transportasi akan semakin bertambah, hal tersebut biasa terlihat di wilayah perkotaan, jika masalah kemacetan tidak segera di tangani maka akan menimbulkan penumpukan transportasi di jalan.

Kota Batam merupakan pusat dari Kepulauan Riau, karena merupakan kota terbesar dari empat kota lainnya seperti Kota Bintan, Kota Anambas, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Lingga. Luas dari kota Batam sendiri mencapai 1,038,85 Km² dengan jumlah kepadatan penduduk yang sangat besar hingga mencapai 1,196,397 Jiwa. Dari tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 20,389 jiwa sampai tahun 2020. karena tidak menutup kemungkinan Batam merupakan kota industri yang letaknya sangat berdekatan dengan negara besar seperti

Singapura dan Malaysia yang memiliki sektor ekonomi yang cukup baik, sehingga tidak menutup kemungkinan akan bertambah banyak urbanisasi ke Kota Batam. Dalam aktifitas seperti ini pemerintah harus cepat bertindak karena dalam suatu wilayah pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya, terutama dalam agenda pelayanan, sosialisasi, dan melakukan pengawasan harus selalu dilaksanakan karena besarnya jumlah penduduk memaksakan untuk menambah alat transportasi dan sangat mempengaruhi kemacetan lalulintas.

Transportasi sangat diperlukan dalam Dalam kehidupan sehari-hari karena sangat membantu manusia dalam beraktifitas, terutama di Batam, angkutan umum biasa digemari oleh masyarakat karena biaya transportasinya yang relatif murah. Bentuk dari angkutan umum yang ada di Batam ada yang berbentuk trayek dan non trayek. angkutan umum trayek juga bervariasi, ada yang bentuk Bus kota, Bus Trans Batam, dan Metro trans, non trayek Taksi, jenis Bus Kota sendiri memiliki tiga rute tujuan utama yaitu bus biru dari Jalan Dapur Dua belas Sagulung sampai ke Nagoya melalui Batam Center, untuk bagian trayek bimbar berwarna merah dari Jalan Dapur Duabelas Sagulung, selanjutnya ke Nagoya melalui jalur Suka Jadi, dan yang terakhir untuk rute bus Kota merah muda dari Jodoh menuju ke Nongsa melalui Batam Center.

Pengawasan yang dilakukan Oleh Dinas Perhubungan memiliki peran yang sangat penting demi keamanan dan penertiban berlalulintas sehingga masyarakat dapat dengan nyaman ketika berada didalam transportasi umum serta kelancaran dan keamanan di jalan. Dinas Perhubungan dalam hal ini sangat mengantisipasi

bertambahnya angkutan umum yang tidak melakukan uji layak jalan, maka dari instansi tersebut memberikan himbauan dengan peraturan daerah bahwa harus ada pemutihan dan peremajaan angkutan umum untuk keamanan dan kenyamanan berlalulintas yaitu dengan melakukan pengandangan angkutan umum yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan terhadap penumpang sehingga masyarakat dengan aman, nyaman dan tenang dalam menaiki angkutan umum.

Jika pemerintah ingin melakukan peremajaan dan mengandangan kendaraan umum maka pemerintah harus melakukan tindakan, tidak hanya melakukan sosialisasi tetapi juga memberikan solusi bagaimana angkutan umum tersebut bisa di remajakan kembali. Bisa dilakukan kerja sama antara pemerintah Kota Batam dan perusahaan angkutan umum untuk membantu memberikan dana kepada perusahaan angkutan umum dan perusahaan melakukan pembayaran pajak sebagai imbalanya, sehingga dampaknya yaitu masyarakat dengan nyaman menggunakan angkutan umum, perusahaan mendapatkan citra yang baik oleh retribusi kepada pemerintah, tidak terlepas melakukan uji layak jalan selama 6 bulan sekali. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka angkutan umum akan terus mengalami kenaikan tidak layak jalan dilihat dari data sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Angkutan Umum Dalam Trayek di Kota Batam Tahun 2018-2020

No.	Jenis Angkutan Trayek Utama	Masa Lama Oprasi	Tahun		
			2018	2019	2020
1.	Layak Usia Operasi	Maksimal, 18 Tahun	271	261	224
2.	Habis Usia Operasi	Lebih Dari, 18 Tahun	346	356	393
Jumlah			617	617	617
No.	Jenis Angkutan Trayek Cbang	Masa Lama Oprasi	Tahun		
			2018	2019	2020
1.	Layak Usia Operasi	Maksimal, 15 Tahun	269	202	142
2.	Habis Usia Operasi	Lebih Dari, 15 Tahun	1476	1543	1603
Jumlah			1745	1745	1745

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2020.

Dalam permasalahan yang diakibatkan oleh angkutan umum jenis trayek utama tidak melakukan uji KIR terlihat dari bodi kendaraan yang keropos, ada juga yang bodi kendaraan miring. Disebutkan bahwa angkutan umum trayek utama yang tidak melakukan layak uji jalan terhitung dari keseluruhan rute utama terdapat 617 tercatat beroperasi, jumlah angkutan umum yang habis usia oprasi dari Tahun 2018-2019 tecatat 10 unit kendaraan, sedangkan dari Tahun 2019-2020 tercatat 37 unit kendaraan yang habis usia oprasi. Trayek cabang dari tahun 2018-2020 yang habis usia oprasi sebanyak 127 kendaraan selama 3 tahun terakhir. Dari keseluruhan angkutan umum yang layak usia oprasi yang rutin melakukan uji layak jalan hanya sebanyak 60 kendaraan saja. Dinas Perhubungan juga rutin melakukan razia selama setiap bulanya, selain itu juga sudah memanggil badan usaha untuk melakukan sosialisasi terhadap angkutan umum tersebut tidak terlepas didampingi oleh pihak kepolisian. Dinas perhubungan juga sudah pernah melakukan pengandangan terhadap angkutan umum yantu tidak layak uji jalan, karena ada rasa jiwa sosial maka peraturan yang telah dibuat tidak diterapkan. (TribunBatam.id 2020).

Menurut Farida, masalah yang dihadapi terhadap transportasi bus Kabupaten Garut sering mengalami kecelakaan lalulintas jalan disebabkan oleh *human error*. Strategi yang dapat dilakukan yaitu penetapan dalam bentuk sistem manajemen kendaraan angkutan umum, berupa pemeriksaan angkutan umum di area terminal, dalam pelaksanaan pengawasannya dilakukan dalam bentuk pengamatan, inspeksi, sarana dan prasarana, audit, serta pelaksanaan penegakan hukum dilapangan. Dalam penerap terhadap angkutan umum harus melakukan uji kelayakan jalan, mengharuskan pengusaha angkutan menerapkan sistem manajemen keselamatan angkutan umum serta pelaksanaan perizinan angkutan umum diperketat (Farida 2018:216).

Menurut pendapat (Sonya Sulistyono, Ludfi Djakfar 2017:108) dari hasil penelitian tersebut kinerja pelayanan yang mengakibatkan tumpang tindih trayek merupakan masalah dasar pada transportasi umum Kota Jember, terutama dari segi pengawasan dan perencanaan perbaikan pelayanan yang masih rendah. Dalam melakukan penataan ulang jaringan trayek yang dilakukan sesuai dengan perundangan yang berlaku bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan angkutan umum pada daerah Kota Jember.

Pada hari Rabu 2 Oktober 2018 sebuah bus kota (Dapur 12) BP 7282 DU terjadi kecelakaan di bukit daeng, Tembesi, di area Dam Muka Kuning, bus tersebut lepas kendali dan menabrak lampu jalan dan terguling dan mengakibatkan satu orang penumpang patah kaki akibat dari kejadian tersebut. Setelah ditelusuri lebih lanjut angkutan umum tersebut sudah tidak melakukan uji layak jalan selama satu tahun lebih. Pada Selasa 8 Januari 2019 seorang

pengendara sepeda motor dengan nama inisial (WM) tewas di tabrak angkutan umum jenis bimbar dengan nomor kendaraan BP 7264 DU. Kecelakaan tersebut terjadi di simpang Kepri Mall, Jalan Sudirman, Batam, Kepulauan Riau.(wartarakyat.co.id 2020)

Permasalahan yang terjadi pada senin 17 februari 2020 angkutan umum jenis bus kota BP 7601 DU mengakibatkan kecelakaan lalulintas di jalan Letjen R. Suprpto (bukit daeng) Batu Aji Kota Batam, yang menabrak dua sepeda motor dan satu orang meninggal dunia supir angkutan umum tersebut di vonis lima tahun penjara. dipastikan tidak mengikuti uji layak jalan, karena setelah diselidiki ternyata angkutan tersebut lampu penerangan mati, tidak dilengkapi lampu sen, dan rem depan dan belakang tidak berfungsi secara normal, (BatamPos.co.id 2020).

Dari berbagai permasalahan yang telah terjadi maka dapat dilakukan penelitian dalam menelusuri serta memahami bagaimana pemerintah melakukan pengawasan terhadap angkutan umum di Kota Batam. Sehingga peneliti dapat mengangkat judul “Analisis Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Uji Layak Jalan Angkutan Umum Kota Batam”.

Dari berbagai permasalahan yang telah terjadi maka dapat dilakukan penelitian dalam menelusuri serta memahami bagaimana pemerintah melakukan pengawasan terhadap angkutan umum di Kota Batam. Sehingga peneliti dapat mengangkat judul **“Analisis Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Uji Layak Jalan Angkutan Umum Kota Batam”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari hasil pembahasan yang telah dibuat dilatar belakang , penulis mampu merumuskan identifikasi permasalahan yaitu :

1. Jumlah angkutan umum semakin banyak di Kota Batam
2. Tingginya jumlah dari umur angkutan umum yang melebihi usia operasi.
3. Banyaknya angkutan umum yang tidak melakukan uji KIR (UJI layak jalan) di Kota Batam.
4. Kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan terhadap angkutan umum.

1.3. Batasan Masalah

Fokus yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Uji Layak Jalan (KIR) angkutan umum di Jalan Jendral Sudirman Nomor 2 Sukajadi Kecamatan Batam Kota, Kepulauan Riau. Kegiatan di lapangan tidak lepas dari pihak kepolisian Satlantas Polresta Barelang dalam melakukan penertiban angkutan umum.

1.4. Rumusan Masalah

Dari rumusan Masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai tugas akhir adalah :

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Uji Layak Jalan Angkutan Umum Kota Batam ?

2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam melakukan Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Uji Layak Jalan Angkutan Umum Kota Batam ?

1.5. Tujuan Penelitian

Seperti yang telah disampaikan dari perumusan tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa pengawasan dinas perhubungan terhadap uji layak jalan angkutan umum Kota Batam.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor penghambat yang dialami Dinas Perhubungan terhadap masyarakat (pengusaha angkutan) dalam melakukan pengawasan uji layak jalan angkutan umum Kota Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tentang pengawasan dinas perhubungan dalam uji layak jalan angkutan umum yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang didapat secara teoritis terhadap hasil dari penelitian ini memperluas pengetahuan ilmu Administrasi Negara yang memiliki keterkaitan dengan Pengantar Manajemen, Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah, Manajemen Pelayanan Publik.

2. Manfaat Praktis

Untuk bisa memahami pengawasan Dinas Perhubungan terhadap uji layak jalan angkutan umum Kota Batam dengan efektif, kemudian meningkatkan pengetahuan, daya berfikir, dan menganalisa secara sistematis, serta dalam melaksanakan penelitian untuk menciptakan tulisan dalam bentuk karya ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Pelayanan Publik

Menurut Johan & Hasan Manajmen jika diartikan dalam bentuk bahasa asing dapat disebut dalam kata *manage* yaitu mengatur, membina, mengelola, dan menerapkan. Manajmen dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang tugasnya tidak lepas dari memperoleh keyakinan terhadap predikat dimensi teoritik dan metodologi yang harus di uji kebenarannya serta dibuktikan sesuai dengan fakta, data secara objektif. Dalam menjalankan tugasnya manajer sering menjalan berbagai Fungsi manajmen sebagai bagian dari pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. (Badrudin 2020:1)

2.1.1. Konsep Manajemen Pelayanan

Dalam pengertiannya manajemen dapat diartikan sebagai sebuah seni dan ilmu suatu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan SDM supaya tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dan direncanakan. Gibson, Donelly dan Ivancevich mengartikan manajmen sebagai kegiatan yang sedang dilakukan terhadap perorangan maupun kelompok dalam mengkoordinasikan bermacam kegiatan untuk mencapa hasil yang telah ditetapkan.

Manajemen pelayanan dapat diartikan sebagai proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengoordinasikan dan menyelesaikan kegiatan-kegiatan pelayanan untuk terselenggaranya tujuan pelayanan yang optimal (Mukarom 2015:80).

2.1.2. Analisis kebijakan Manajemen Pelayanan

Indonesia terdapat beberapa kelemahan dalam manajemen pelayanan dan perizinan yaitu :

1. Sistem yang telah dibuat masih belum sepenuhnya menghubungkan secara langsung prestasi kerja yang dilakukan oleh aparat terhadap karier yang telah didapatkan, sehingga pegawai yang kurang memiliki prestasi kerja bisa naik pangkat, sebaliknya yang memiliki prestasi kerja bagus dan memberikan pelayanan kepada masyarakat justru lambat untuk menaikkan karirnya.
2. Sistem yang ada sudah mampu mengatasi masalah-masalah yang bersifat teknis manajerial, namun masih kurang dalam memperbaiki masalah dalam bentuk berbentuk strategis kebijakan. Dalam mengurus surat perizinan lebih dari satu perizinan walaupun tempatnya satu atap tetapi prosedur, jumlah kelengkapan dan biaya yang diberikan masih tetap sama.
3. Masalah yang sering terjadi biasanya sistem manajemen tersebut masih belum disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui prosedur dan tata cara dalam pendaftaran pelayanan yang harus diikuti. Hal tersebut mengakibatkan partisipasi masyarakat juga sangat rendah.

2.1.3. Kebijakan Manajemen Pelayanan Publik

Manajemen pelayanan publik memiliki peran yang sangat penting dalam tercapainya pelayanan yang prima. Hal tersebut tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat yaitu sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 90/MENPAN/ 1989 menerangkan tentang penyederhanaan pelayanan publik.
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 1/1993 tentang pedoman tatalaksana pelayanan umum. Yang mengatur tentang tatalaksana pelayanan, azas pelayanan, biaya pelayanan, serta penyelesaian persoalan dan sengketa.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 yang membahas tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah terhadap masyarakat.
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 tahun 2004 tentang transportasi dan angkutan pelayanan.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 tahun 2004 yang isinya menyangkut tentang penanganan pengaduan masyarakat. (Mukarom 2015:93)

2.1.4. Proses Tahapan Manajemen

Proses merupakan suatu bentuk metode yang telah tersusun secara sistematis dalam melaksanakan suatu tugas dan fungsinya. Adapun fungsi yang ada dalam manajemen menurut George R Terry dapat berupa perencanaan

(*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), Menggerakkan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*). Oleh sebab itu manajemen sebagai ilmu sangat penting untuk dikembangkan supaya memperoleh keberhasilan dan kebenarannya (Wijayanto 2012:9).

Fungsi manajemen yang terakhir adalah pengawasan (*Controlling*), yang biasa disebut juga pengendalian yang bertugas mengadakan pemantauan dan melakukan pengoreksian sehingga tujuan yang telah terencana dapat berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada saat organisasi berjalan menuju sasaran yang telah ditetapkan, manajer harus mengawasi kegiatannya supaya tidak terjadi penyimpangan dari perencanaan, pengorganisasian yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2. Pengawasan

Dalam kamus bahasa Indonesia Pengawasan jika dilihat dari pemecahan katanya berasal dari kata “awas” dari awalan “an” dan diakhiri “an” yang memiliki arti penjagaan dan penilikan. Dapat diartikan pengawasan adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mencegah apabila terjadi penyalahgunaan tugas pemerintahan, sebagai landasan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dasar ini menjadi harga mati yang melambangkan eksistensi Negara Republik Indonesia (Murharani 2014:1) Pengawasan juga bisa di artikan sebagai suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan yang sedang berjalan. Dalam pelaksanaannya pengawasan memiliki peran yang sangat penting, karena suatu

kegiatan yang berjalan dengan baik tergantung oleh pengawasan yang baik begitu sebaliknya sehingga tujuan yang dicapai dapat memuaskan.

Menurut Manullang dalam buku (Murharani 2014:3). Pengertian pengawasan yaitu suatu kegiatan dalam menetapkan kegiatan terhadap pelaksanaan yang telah ditetapkan, melakukan penilaian, dan melaksanakan pengoreksian dengan maksud agar penerapan pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan lancar.

Menurut Dale dalam buku (Mukharom 2015:156), berpendapat bahwa untuk melakukan pengawasan tidak harus dilakukan secara langsung dan bersamaan serta langsung melaporkan dari hasil pengawasannya, tetapi juga memiliki arti memperbaiki dan membenahi pekerjaan yang salah sehingga kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Siagian mengemukakan pendapatnya bahwa pengawasan merupakan kegiatan memantau dari pelaksana keseluruhan kegiatan organisasi untuk menghasilkan kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2.1. Indikator Pengawasan

Menurut Robert dan Gilbert Jr (Wijayanto 2012:220) mengemukakan empat indikator pengawasan pelayanan publik yaitu sebagai berikut :

1. Menetapkan Standar (*Standars*) yaitu menetapkan tolak ukur atau batasan terhadap apa yang harus dilakukan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.

2. Pengukuran (*Measurement*) merupakan proses yang berulang-ulang dan kontinu dalam bentuk pengamatan, laporan, pengujian dan sampel.
3. Membandingkan (*Compare*) yaitu melakukan perbandingan hasil yang telah didapat dengan target atau standar yang telah ditentukan sebelumnya, yang hasilnya lebih baik, kurang baik, atau sama dengan standar.
4. Melakukan Tindakan (*Action*) merupakan tindakan yang dilakukan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan penyimpangan yang terjadi.

2.2.2. Maksud Dan Tujuan Pengawasan

Dalam melaksanakan pelaksanaan suatu pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah secara terencana, dibutuhkan pengawasan karena dengan adanya pengawasan tujuan yang telah tersusun dapat terlaksana dengan baik dan dapat mengikuti protokol yang telah dibuat oleh pemerintah. Pengawasan sangat penting dalam terlaksananya suatu pekerjaan dan tugas pemerintahan sehingga pengawasan memiliki tujuan yaitu :

1. Mengetahui jalanya pekerjaan, apakah sesuai dengan protokol yang telah di tentukan sebelumnya atau tidak
2. Membenahi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan supaya kesalahan yang sama tidak terulang kembali atau timbul kesalahan yang lainnya.
3. Memahami penerapan pekerjaan sesuai dengan kegiatan yang sudah tersusun dan terencana sebelumnya.

2.2.3. Bentuk Pelaksanaan Pengawasan

Sehubungan dengan adanya proses pengorganisasian pengawasan yang harus memiliki adanya bentuk dari kepemimpinan yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka dari itu pengawasan dapat di klasifikasikan berdasarkan berbagai hal yaitu :

1. Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang kegiatannya diterapkan oleh pimpinan dan pengawas terhadap kegiatan yang telah dibuat dengan melakukan proses mengamati, meneliti, memeriksa, dan meneliti secara langsung dari tempat pekerjaan serta menerima bentuk dari laporan-laporan secara langsung oleh pelaksana organisasi tersebut.
2. Pengawasan tidak langsung, pengawasan ini dilakukan dalam bentuk laporan yang diberikan oleh pelaksana dalam bentuk lisan maupun tulisan, dari hasil pendapat masyarakat.
3. Pengawasan internal, dalam melakukan pengawasan ini dilakukan oleh aparatur yang bekerja di dalam instansi terkait. Pengawasan ini biasanya dilaksanakan oleh instansi itu sendiri yang secara langsung biasa dilakukan secara rutin.
4. Pengawasan eksternal, pengawasan ini biasanya disebut dengan pengawasan dari luar merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur diluar instansi terkait. Maksud dari luar adalah pihak instansi yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berjalan tetapi bukan dari pihak organisasi yang melakukan pengawasan. Dalam

melakukan kinerjanya pengawasan ini bersifat profesional atau tidak memihak. (Andri Ferianto 2015:64)

2.2.4. Proses Tahapan Pengawasan

Dalam proses pelaksanaan pengawasan memiliki arti yang penting agar terselenggaranya suatu pelayanan publik. Pengawasan yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari pelaksanaan proses administrasi oleh pemerintah terhadap masyarakat, dan tidak lepas dari peningkatan efektifitas dan efisiensi terhadappencapaian sasaran dan penerapan amanah pelayanan publik. Terdapat tiga tipe dalam pelaksanaan pengawasan yaitu :

1. *Preliminary Control,*

Pengawasan ini merupakan pengawasan pendahuluan sebelum proses kegiatan perencanaan dilakukan, Karena kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, unit layanan teknis layanan umum juga bisa di pahami apakah dalam pelaksanaan pelayanan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau malah mempersulitnya. Jadi pengawasan dilakukan sebelum masalah tersebut terjadi.

2. *Interim Control,*

Pengawasan ini bertujuan apakah pelaksanaan yang dilakukan sama dengan standar yang telah ditetapkan serta mencukupi keinginan pelanggan atau tidak. Dalam kegiatan memberikan pelayanan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pengawasan ini juga dapat diarahkan kepada pelaksanaan

anggaran atas layanan masyarakat atau juga waktu berlalunya peraturan sebelum di tetapkan.

3. *Post Control*

Selain mengetahui pelayanan terhadap masyarakat berjalan sesuai dengan perencanaan awal, *post control* juga berfungsi sebagai tempat untuk mengevaluasi terhadap sasaran yang direncanakan. Dalam pengawasan ini dilakukan untuk memperbaiki, mempertahankan, dan juga meningkatkan kualitas layanan masyarakat.

2.2.5. Pelayanan Publik

Menurut Supriyatna pelayanan merupakan tuntutan yang sangat mendasar bagi manajemen pemerintahan sekarang, karena dilihat dari perkembangan teknologi yang semakin maju mendorong pelayanan yang prima dan di dampingi nilai ekonomi dan manajemen yang pasti. Dalam melakukan pelayanan umum berdasarkan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) mengemukakan bahwa semua bentuk dari pelaksanaan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, serta dikawasan BUMN yang dibuat dalam bentuk barang maupun jasa, baik itu untuk memenuhi Kebutuhan masyarakat maupun terhadap pelaksanaan ketetapan peraturan yang lebih tinggi (Anggara 2012:567).

2.2.6. Pengawasan Pelayanan Publik

Dalam melakukan pengawasan pengorganisasian yang melibatkan adanya bentuk kepemimpinan yang mampu melaksanakan pekerjaan serta dapat

memberikan pertanggung jawaban terhadap pekerjaannya dengan baik, maka ada beberapa cabang macam pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Melekat

Dalam Pengawasan melekat ini yang dilaksanakan oleh aparat terhadap suatu instansi itu sendiri yang dilakukan oleh pihak atasan langsung terhadap bawahannya supaya pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dilakukan sesuai dengan rencana awal.

2. Pengawasan luar

Pengawasan luar, pengawasan ini biasanya dilakukan oleh instansi dari luar organisasi yang terkait, dilakukan secara profesional serta tidak memihak terhadap pengawasan yang dilakukannya.

3. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat, bentuk dari pengawasan dalam bentuk laporan ataupun pengaduan terhadap ketidaksesuaian dan kelemahan terhadap pelaksanaan pelayanan umum. (Mukharom 2015:87)

Selain pengertian pengawasan yang dibuat di atas, pengawasan dapat dibagi berdasarkan tujuannya. Maka dari itu ada pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan Preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan sebelum kegiatan dilaksanakan. Tujuan dari pengawasan preventif adalah supaya tidak terjadi penyimpangan saat mempersiapkan rencana yang akan dilaksanakan. Pengawasan Represif dapat diartikan pelaksanaan yang dilaksanakan ketika suatu

kegiatan sudah berjalan atau sudah selesai dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang nantinya apakah ada kecocokan atau ketidak beresan terhadap aktivitasnya dan akan di carikan solusi atas permasalahan tersebut.

2.3. Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan

Hambatan dapat diartikan sebagai suatu permasalahan atau halangan yang terjadi didalam. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2015) terdapat berbagai faktor penghambat terutama dalam prosas pengawasan yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Anggaran

Anggaran daerah atau dikenal dengan APBD diartikan sebagai rencana uang tahunan oleh pemerintah daerah yang kegiatannya dibahas dan disetujui oleh DPRD penetapannya dilakukan oleh peraturan daerah. Salah satu fungsi dari anggaran pendapatan belanja daerah adalah fungsi pengawasan yang memiliki pengertian bahwa dana daerah menjadi patokan dalam menilai bagaimana penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah sejalan dengan ketetapan yang telah ditentukan atau sebaliknya. (Hanif Nurcholis, Enceng 2015:4.10)

2. Faktor Sarana Dan Prasarana

Dalam faktor ini diartikan sebagai suatu bentuk pelaksanaan untuk mengamati, mengukur, memeriksa, membandingkan dan juga melakukan penilaian dari keseluruhan jalanya suatu kegiatan dalam manajmen untuk

menghindari berbagai penyimpangan, dan juga penyalahgunaan yang seharusnya sudah ditetapkan dalam peraturan.

3. Faktor Kebijakan Pemerintah Daerah

Semangkin banyak masalah yang dihadapi maka akan semangkin banyak pula peraturan daerah yang diperlukan untuk memecahkannya. Supaya dapat tersusun secara efektif dalam memecahkan masalah, maka diperlukan kegiatan penelitian yang konkrit tujuannya untuk menganalisa dari akar masalah dan selanjutnya akan dibentuk dan disusun dalam bentuk naskah, dari naskah akademik ini selajutnya akan disusun rencana peraturan daerah.

Ada peraturan-peraturan daerah yang melahirkan sebuah kebijakan yang nyatanya tidak efektif dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Hal tersebut bisa disebabkan karena timbulnya peraturan daerah itu tidak diawali oleh naskah akademik yang susunanya berdasarkan dari hasil penelitian dan pengkajian yang sangat rinci terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi.

4. Faktor Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaanya faktor ini sangat berpengaruh besar dalam proses pengawasan yaitu Sumber daya manusia, yang didalamnya terdapat pihak-pihak yang terkait dalam proses Pengawasan (Dadang Suwanda 2017:17). Rekrutmen karyawan yang handal sangat mempengaruhi proses berjalanya suatu organisasi dengan baik, dengan mendapatkan calon karyawan proses manajemen dapat berjalan dengan lancar terutama dalam proses pengawasan, karena dalam proses pengawasan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang telah ditetapkan

didalam perusahaan maupun instansi pemerintahan, apakah proses kegiatannya oleh sebab itu memiliki tenaga kerja yang ahli dibidangnya sangat berpengaruh besar terhadap terselenggaranya proses kegiatan secara efektif.

2.4. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan

Dalam Undang-Undang yang di maksud Pasal 1 UU Nomor 22 tahun 2009 :

1. Lalu Lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lintas jalan.
2. Angkutan merupakan perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lainya dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Pembinaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan :

1. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas angkutan jalan.
2. Penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan yang berlaku.
3. Penetapan kopensasi pejabat yang melakukan fungsi dibidang lalulintas dan angkutan jalan.
4. Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada pemerintah profinsi dan kabupaten/kota.
5. Pengawasan terhadap norma, standar, pedoman, krireria dan prosedur yang di lakukan oleh pemerintah daerah.

2.4.1. Uji Kelayakan Kendaraan Umum

Dalam memberikan kualitas pelayanan, keamanan dan kenyamanan dalam transportasi umum diperlukan pengujian berkala yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Keberhasilan pada keamanan transportasi umum dititik beratkan pada kelayakan uji berkala dan tidak lepas dari pengawasan oleh Dinas Perhubungan dan Pengusaha Angkutan.

Disebutkan Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, yang diperdalam dalam peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 133 Tahun 2015 yang isinya tentang pengujian berkala kendaraan bermotor menerangkan bahwa uji berkala perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf c di lakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan berikutnya. Dalam melakukan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor dilakukan tanpa menggunakan alat uji.

2.4.2. Angkutan Umum

Kendaraan yang digunakan untuk memindahkan barang maupun orang dari tempat awal berpindah ke tempat lainya merupakan tugas dari angkutan maupun transportasi. Tujuan dari angkutan tersebut yaitu untuk membantu orang atau juga kelompok orang untuk menjangkau berbagai tempat yang dituju, atau juga mengirim barang dari tempat awal ke tempat yang dituju. Dalam melakukan pengangkutan tersebutbisa diterapkan menggunakan peralatan angkutan dalam bentuk angkutan bantuan hewan maupun, mesin.dapat diartikan angkutan mumum merupakan layanan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang

tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum. Angkutan umum dapat berupa angkutan trayek (Bus, Mini Bus, Bus Trans) taxi, bus karyawan, bus pariwisata, angkutan di air dan angkutan di udara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang lalu lintas angkutan jalan dan jaringan transportasi jalan dan peremajaan, penambahan dan penghapusan kendaraan bermotor melalui Dinas Perhubungan Kota Batam dijelaskan angkutan merupakan kendaraan yang diberikan oleh pemerintah untuk digunakan oleh masyarakat dengan dipungut biaya.

1. Setiap angkutan kendaraan yang tidak layak jalan harus di remajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Setiap peremajaan penggantian dan pengalihan kepemilikan angkutan kendaraan umum harus di setujui oleh walikota atau juga pejabat yang ditunjuk.
3. Peremajaan di lakukan atas :
 - a. permintaan pemilik kendaraan
 - b. pembatasan usia pakai kendaraan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
4. Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan pasal 50 harus mengajukan permohonan tertulis kepada walikota atau pejabat yang di tunjuk.
5. Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di tetapkan oleh pemerintah (Pasal 54 Nomor 9 Tahun 2001).

2.5. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian ini dilakukan oleh Muhamad Robi Depala Dengan Judul “Analisis Pengawasan Pengujian Kelaikan Oplet Di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”. Penelitian ini mengacu pada sumber data yang digunakan, pengamatan yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru masih meloloskan transportasi umum dalam pengujian layak jalan dan pengujian berkala dalam pengujian teknis, karena jika mengikuti prosedur sesuai Undang-Undang yang berlaku Masalah yang terjadi ketika melakukan pengujian transportasi umum adalah kekurangan fasilitas yang cukup untuk melakukan pengujian transportasi, serta kurangnya kesadaran pemilik oplet dalam melakukan pengujian.(Depala 2020:81)
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Venencensius Dimas T dan Ida Hayu, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan pengawasan di Dinas Perhubungan Kota Semarang, dengan judul "Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Kelayakan Jalan Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang" dalam pelaksanaan pengawasan tersebut diawali dari standar, pengukuran, perbandingan, dan melakukan pengoreksian. Pengawasan Kelayakan uji angkutan umum dari peningkatan kendaraan wajib uji KIR dapat dilaksanakan dengan baik. saat melakukan penelitian dilapangan peneliti langsung melihat jumlah angkutan yang melakukan pengujian dalam

setiap tahunnya dilihat dalam data yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang. (Hayu 2021)

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Kiki Yunita Sari , Linayati Lestari 2019) dengan judul penelitian "Analisis Fungsi Pengawasan Uji Berkala Oleh Dinas Perhubungan Kota Batam Terhadap Angkutan Kota". hasil penelitian menunjukkan terlalu banyaknya transportasi umum yang tidak memenuhi standar, hal ini melihatkan kurangnya pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penertiban transportasi umum, dalam penelitian ini masih banyak pelanggaran, serta lemahnya pengawasan penertiban transportasi umum.
4. Penelitian ini dilakukan oleh (Arben 2020) dengan judul “Kewajiban Uji Berkala Kendaraan Bus di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar” .Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan kewajiban uji berkala angkutan jalan di Kabupaten Kampar belum dapat terlaksana dengan baik, karena hali ini masi banyak ditemukan kendaraan bus umum yang tidak melakukan ujii persyaratan layak jalan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. hambatan pelaksanaan kewajiban uji berkala kendaraan bus tersebut terhambat oleh faktor geografis, ekonomi, dan faktor sumberdaya manusia.
5. Penelitian ini di lakukan oleh “(Dedi Epriadi, Karol Teovani Lodan 2019)“
Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Volume 5 No. 1 Juni 2019, pISSN : 2460-6162 eISSN : 2527-6476. Dengan judul penelitian "Analisis Gaya Kepemimpinan di Organisasi Pemerintah Daerah" (Studi

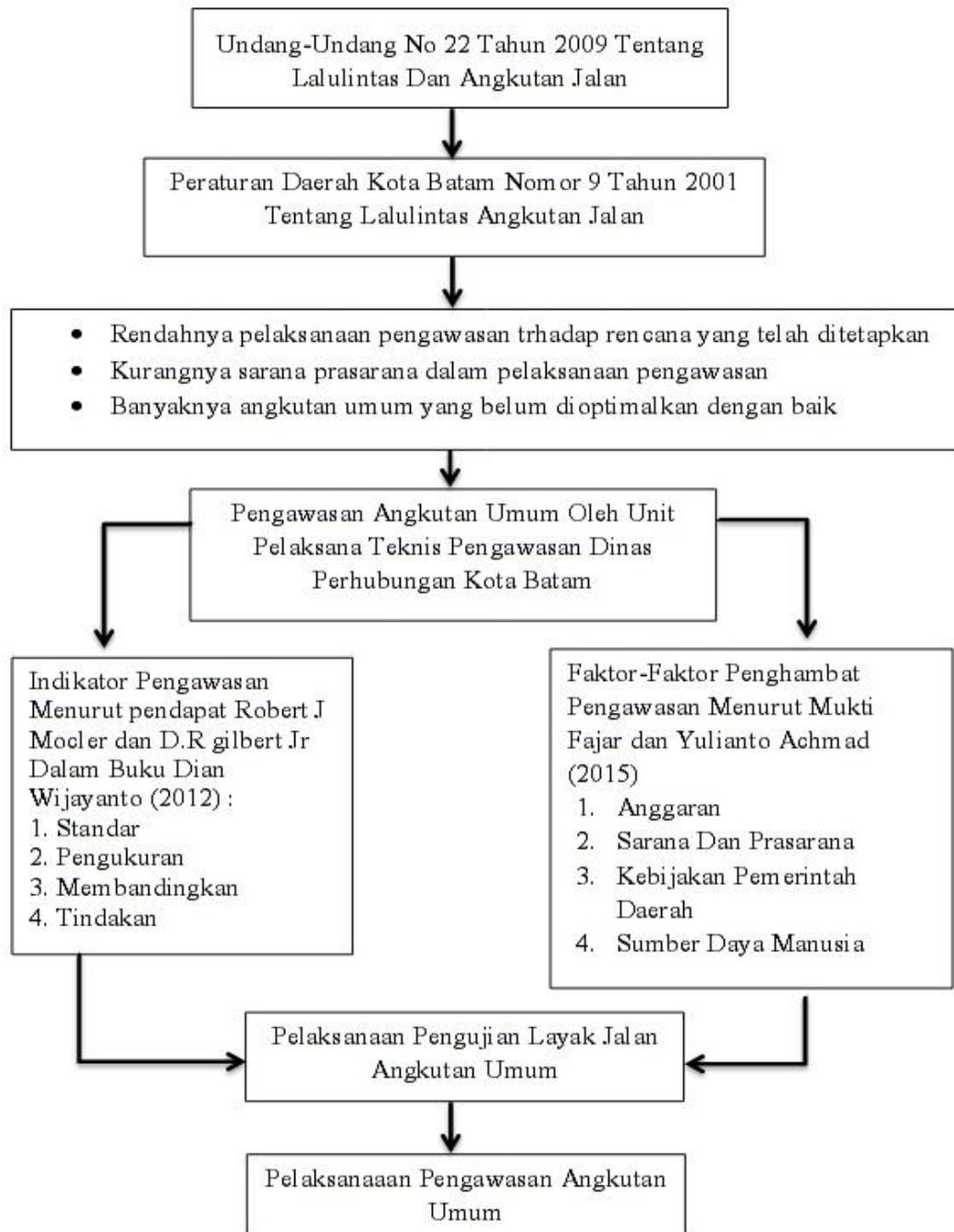
Kasus Kabupaten Merangin). Hasil penelitian Ini menunjukkan Bahwa kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala pimpinan sekretariat daerah kabupaten maringin belum optimal terhadap kualitas kinerja karyawan. masalah ini dapat dilihat dari pekerjaan karyawan yang dibantu oleh atasan, pujian dan kritik, atasan terhadap mengarahkan bawahnya untuk menyiapkan tugas, saerta pujian dan komentar atasan kepada bawahan. Hambatan yang dialami yaitu lemahnya kesadaran dan kedisiplinan dalam pekerjaan serta lemahnya kualitas kemampuan atasan dalam mememanajemen SDM.

6. Penelitian ini yang dilakukan oleh Vencencsius Dimas T, Ida Hayu. Jurnal Administrasi Publik yang berjudul “Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Kelayakan Jalan Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang”. Menjelaskan bahwa peningkatan kendaraan yang wajib uji dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan berjalan dengan baik. dilakukan perbandingan dengan langsung melihat berapa jumlah kendaraan yang telah melakukan uji kelayakan setiap tahunnya dari data yang didapat dari Dinas Perhubungan. (Vencencsius Dimas T 2021)
7. Penelitian oleh Muharam Firdaus, Denny Hernawan, Ginung Pratidina, yang berjudul "Pengaruh Pengawasan Dinas Llj Terhadap Kedisiplinan Pengemudi Angkutan Umum Di Kota Bogor". Dimuat dalam jurnal governansi ISSN 2442-3971 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2015. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa disiplin pengemudi angkuran umum di Kota Bogor pada umumnya dalam pengujian layak jalan mendapatkan

interpretasi cukup dari jawaban responden, tapi hal ini belum sepenuhnya optimal karena banyak pengemudi angkutan umum yang masih sembarangan dalam menurunkan penumpang bukan pada tempatnya. (Muharam Firdaus, Denny Hernawan 2015)

Penelitian ini yang dilakukan oleh Amin Rais Harahap yang berjudul "Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Perizinan Angkutan Kota dalam Trayek Di Kota Medan". Dalam *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* ISSN 2622-3740, Vol 2, No.2, Desember 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pengawasan angkutan Kota dalam trayek masih adanya personel yang kurang memahami apa yang menjadi tugasnya dilapangan untuk mengawasi angkutan kota, kurangnya partisipasi masyarakat menjadi faktor lemahnya pengawasan karena tidak adanya masukan kepada Dinas Perhubungan sehingga dinas tidak bisa melakukan evaluasi secara baik (Harahap 2019).

2.6. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Barfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan Penelitian penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. tujuannya yaitu bermaksud ingin menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat, mengenai kondisi yang terjadi pada tempat penelitian. Dengan menggunakan metode jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali fakta mengenai Analisis Pengawasan Uji Layak Jalan oleh Dinas Perhubungan di Kota Batam Kota.

3.2. Fokus Penelitian

Menurut pendapat Spradley dalam (Sugiyono 2016:242), adalah sebagai domain tunggal atau beberapa domain yang berhubungan dengan situasi sosial (lingkungan masyarakat). Dalam menentukan rumusan fokus masalah penelitian kualitatif bersifat tentatif, artinya penyempurnaan pada rumusan fokus masalah masih tetap dilakukan saat penelitian sudah berada dilapangan. untuk mempermudah dalam melakukan penelitian skripsi ini, peneliti berfokus terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Uji Layak Jalan Angkutan Umum di Kota Batam.

3.3. Sumber Data

Pengumpulan sumber data dilakukan menggunakan dua metode sumber yaitu :

1. Sumber data primer adalah pengumpulan berbagai data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam bentuk tanya jawab (Sugiyono 2012:243). Ada beberapa informan yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam Kepulauan Riau, prtugas uji layak jalan, Badan usaha angkutan dan supir angkutan umum.

Tabel 3. 1 Data Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Ade candra	Kepala Pengawasan Angkutan Umum
2.	Edo Purba	Bidang Lalin
3.	Andi Miko	Bidang Angkutan
4.	Raja Affandi	Sub Pengujian Kendaraan Bermotor
5.	Hardisan Harun	Pengusaha Angkutan Umum
6.	Sucipto	Supir Angkutan Umum

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021.

2. Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber yang sebelumnya atau bisa juga di sebut dengan data yang tersusun dalam bentuk dokumen.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono 2012:242) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat mudah dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ini yaitu pengumpulan data. Penelitian kualitatif menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Dalam penelitian observasi ini peneliti melakukan pengamatan pada kondisi lapangan serta masalah masalah yang berhubungan dengan berjalanya pengawasan dinas perhubungan dan turun ke lapangan untuk melihat kegiatan-kegiatan yang terjadi di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi maupun wawasan dari stakeholder agar data yang dihasilkan menjadi lebih valid serta mengetahui kondisi situasi saat ini dan peneliti menggunakan wawancara terstruktur

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, peneliti melakukan dokumentasi berupa foto, alat rekam, serta bukti lainnya untuk memperkuat fakta dan data di lapangan dengan tujuan agar dapat dipertanggungjawabkan.

3.5. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan (Sugiyono 2012:243) temat analisis data yaitu suatu pelaksanaan pencarian serta penyesuaian secara terstruktur data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan sehingga menjadi jelas dan mudah untuk di mengerti dalam penelitian kualitatif terdapat tiga pelaksanaan analisis data yaitu :

1. Tahap dalam memasuki di lapangan dengan *grand tour* dan *minitour question*, analisis datanya dengan analisis domain.
2. Tahap menentukan fokus, tahap mengumpulkan data dengan *minitourquestion* dan analisis data dengan analisis taksonomi
3. Tahap *selection*, pertanyaan yang di gunakan adalah pertanyaan struktural dan analisis data dengan analisis komponen serta dilanjutkan dengan analisis tema.

3.6. Keabsahan Data

Dari pendapat (Sugiyono 2016:252–62) Dalam melakukan penetapan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. penerapan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah bentuk-bentuk tertentu. Terdapat empat tipe yang digunakan, seperti derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

1. Kredibilitas

Pengujian ini merupakan kegiatan dengan memperbanyak proses observasi sehingga data yang dihasilkan nantinya mampu meningkatkan kepercayaan serta memahami kondisi lingkungan terkini terkait dengan penelitian tersebut kemudian di lakukan kegiatan wawancara dengan para pemangku kepentingan penelitian supaya data yang di butuhkan menjadi lebih valid.

2. Transferability

Dalam kegiatan pengujian ini memfokuskan pada laporan hasil dari penelitian maupun non penelitian yang di buat, sehingga laporan yang di hasilkan penenelitian dibuat secara jelas tersusun dan mudah untuk dimengerti yang tujuannya dapat di lihat secara ulang olrh orang lain serta evaluasi terkait laporan yang telah di buat peneliti sebelumnya.

3. *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif pengujian ini dilaksanakan dengan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama.

4. *Konfirmability*

Merupakan pelaksanaan kegiatan terhadap pengujian konfirmability dengan melaksanakan konfirmasi terhadap observasi lapangan dan melakukan wawancara dengan kondisi sebenarnya sehingga mencapai tingkat objektifitas.

3.7. Lokasi Dan Jadwal Penelitian

3.7.1. Lokasi Penelitian

Tempat instansi penelitian berada di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam. Dinas Perhubungan Kota Batam di Jl. Jendral Sudirman No.2, Sukajadi, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444, Indonesia. Alasan memilih lokasi penelitian di Dinas perhubungan karena fokus penelitian ini berkaitan

dengan Analisis Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Uji Layak Jalan Angkutan Umum Kota Batam.

3.7.2. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan disetiap hari senin dan selasa untuk mengumpulkan data. pengolahan data dan penelitian di lapangan dilakukan pada saat jam kerja dinas Perhubungan maupun instansi yang bersangkutan. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan dalam massa bulan, terhitung dari bulan terhitung dari bulan Februari 2021 sampai dengan Juni 2021.

Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan				
		Maret 2021	April 2021	Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021
1.	StudiPustaka	■	■			
2.	Penyusunan Skripsi		■	■		
3.	Pengumpulan Data		■	■	■	
4.	Pengolahan Data			■	■	■
5.	Analisis Hasil Penelitian				■	■
6.	Penyusunan Laporan					■
7.	Penyerahan Laporan					■
8.	Sidang Hasil					■